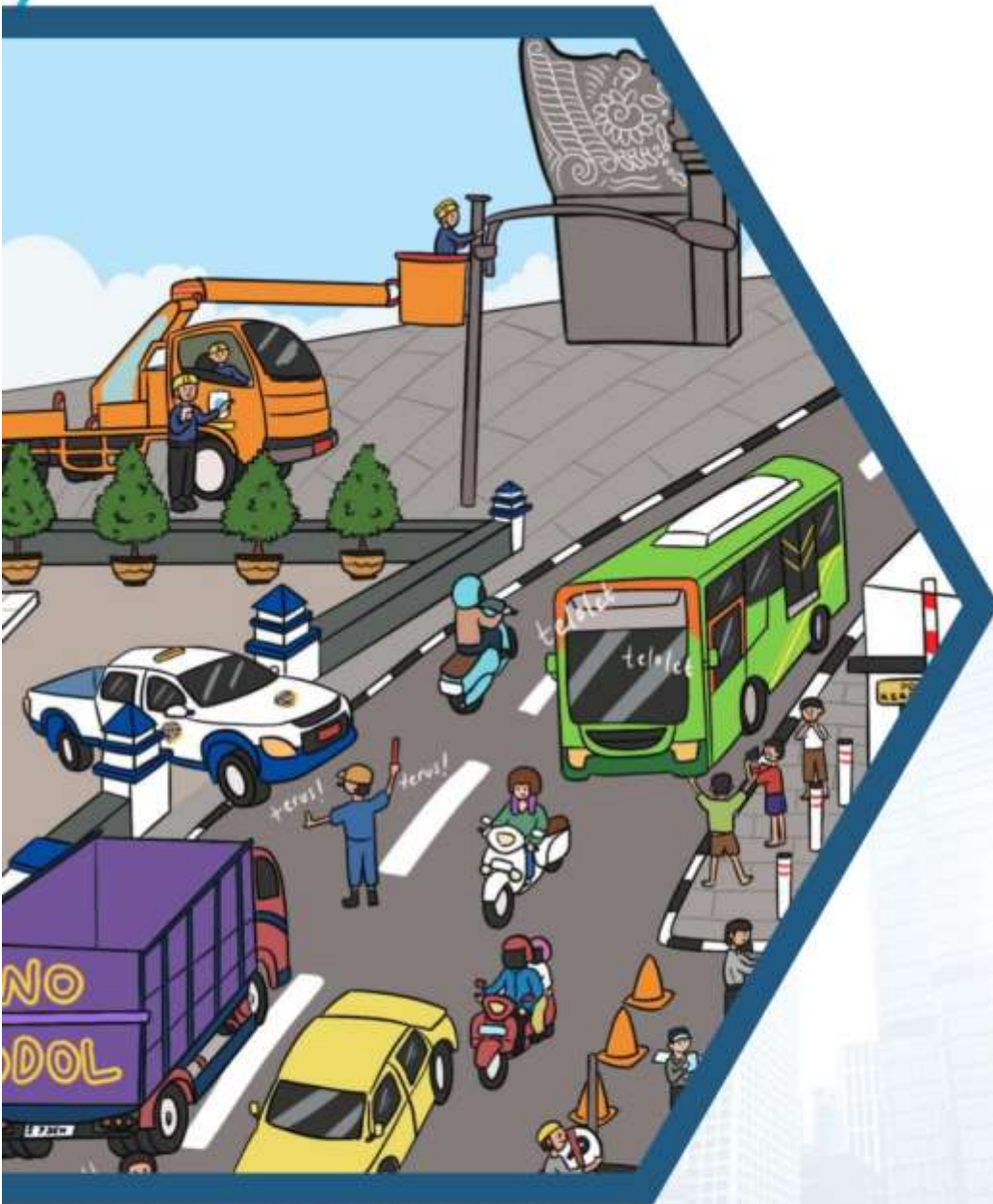



MANAJEMEN RISIKO

DINAS PERHUBUNGAN **TRIWULAN I 2026**



 dishub_lamongan

 lamongankab.go.id/dishub

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan No. 17 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran Perangkat Daerah. Dari risiko tersebut kemudian dilakukan analisis. Analisis risiko merupakan proses penilaian terhadap risiko yang teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level dan status risikonya.

Manajemen risiko sendiri merupakan proses perencanaan, pengaturan, dan pengontrolan aktivitas suatu organisasi, manajemen risiko memiliki sebutan lain yaitu sebuah cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik risiko itu sendiri sudah diketahui ataupun belum diketahui Manajemen risiko dalam arti lain yaitu pendekatan yang terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi terkait risiko, yang mencakup penetapan konteks, identifikasi, analisis, evaluasi, serta perlakuan risiko.

Manajemen risiko dilakukan untuk memetakan risiko yang berpotensi terjadi dalam suatu tahapan kegiatan birokrasi. Risiko yang dinilai berpotensi terjadi tentu harus dilakukan mitigasi agar dalam proses birokrasi suatu OPD dapat berjalan dengan lancar dan efektif. Apabila manajemen risiko tidak dilakukan maka akan menghambat setiap tahapan kegiatan yang dilakukan dalam instansi pemerintahan

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Dinas Perhubungan wajib dan perlu untuk melakukan manajemen risiko guna keberhasilan dalam pencapaian indikator dan dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara berkala sehingga dapat diketahui risiko yang terjadi serta meminimalisir efek terjadinya risiko

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
2. Peraturan Deputi Pengawasan Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan

C. Maksud dan Tujuan

Maksud Manajemen Risiko dilakukan untuk memberikan informasi terkait risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan langkah-langkah preventif atau kuratif dalam penganggulangan terjadinya risiko pada pelaksanaan program dan kegiatan organisasi

Sedangkan Tujuan Manajemen Risiko antara lain:

1. Mengelola risiko dalam pencapaian sasaran strategis organisasi pemerintah
2. Meningkatkan peluang organisasi dalam pencapaian target indikator kinerja
3. Mendorong terciptanya manajemen proaktif, solutif, dan antisipatif
4. Memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan organisasi berdasarkan data risiko yang akan terjadi

D. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Manajemen yang dilakukan di Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan antara lain berkaitan dengan dokumen, sumber daya manusia. Berikut merupakan rincian indicator dalam ruang lingkup yang dijelaskan:

1. Penentuan Kegiatan yang dilakukan pengelolaan risikonya
2. Identifikasi risiko
3. Analisis risiko
4. Pengendalian risiko
5. Pemantaua risiko, dan
6. Koordinasi serta Komunikasi

BAB II

RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH

A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulan I

Berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan pada Triwulan I terdapat empat Program yang berisikan 15 rencana kegiatan yang akan dilakukan pengelolaan manajemen risiko antara lain:

1. Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
8. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
9. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir
10. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
11. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
12. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Kabupaten/Kota
13. Audit Dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
14. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
15. Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian

Berdasarkan kegiatan diatas dilakukan analisis terkait risiko beserta penyebab yang menjadikan adanya kemungkinan terjadinya risiko dalam setiap tahapan kegiatan yang dilakukan. Berikut merupakan rincian tahapan kegiatan beserta pemetaan risiko yang telah dilakukan:

No	Kegiatan	Indikator	Tahapan	Risiko	Sebab	C/UC	Dampak	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
				Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode	Pemilik					
						Risiko						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Data Perencanaan	Risiko Operasional : Petugas kurang memahami dokumen perencanaan	Staff tidak memahami dokumen perencanaan yang dibuat	ROO.26.03.15.27	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	Kurangnya pemahaman staf bidang terkait permintaan data yang dimaksud (Man)	Eksternal	C	Memperlambat penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Dinas Perhubungan
			Permintaan data ke bidang	Risiko Operasional : Lambatnya pemenuhan data dari bidang	Staff bidang lambat dalam pemenuhan data	ROO.26.03.15.27	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	Kurangnya pemahaman staf bidang terkait permintaan data yang dimaksud (Man)	Eksternal	C	Memperlambat penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Dinas Perhubungan
			Pengumpulan data dari bidang	Risiko Fraud : Memanipulasi data yang dikirimkan bidang	Petugas atau staff melakukan manipulasi data	ROO.26.03.15.27	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	Kurangnya pemahaman staf bidang terkait permintaan data yang dimaksud (Man)	Eksternal	C	Memperlambat penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Dinas Perhubungan
			Pengumpulan data dari bidang	Risiko Operasional: Format Data Tidak Sesuai Dengan Data yang diminta	Petugas atau staff melakukan manipulasi data	ROO.26.03.15.27	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	Tidak Ada Template untuk pengisian database (Material)	Eksternal	C	Memperlambat penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Dinas Perhubungan
			Verifikasi data	Risiko Operasional : kurang telitinya petugas dalam memverifikasi	Petugas kurang teliti dalam proses verifikasi	ROO.26.03.15.27	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	Petugas Verifikasi Kurang teliti dalam proses verifikasi (Man)	Internal	C	Memperlambat penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Dinas Perhubungan

No	Kegiatan	Indikator	Tahapan	Risiko	Sebab	C/UC	Dampak	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
				Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode	Pemilik					
						Risiko						
			Penginputan data	Risiko Operasional : kurang telitinya petugas dalam memverifikasi	Petugas kurang teliti dalam proses verifikasi	ROO.26.03.15.27	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	Petugas Verifikasi Kurang teliti dalam proses verifikasi (Man)	Eksternal	C	Memperlambat penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Dinas Perhubungan
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyusunan RKA	Risiko Operasional : lambatnya bidang dalam menyusun anggarannya	Petugas di bidang lambat dalam mengirimkan data	ROO.26.03.15.27	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	Koordinasi Internal Bidang yang Masih Berlangsung dan melebihi deadline yang telah ditentukan (man)	Internal	C	Memperlambat penyusunan dokumen administrasi Keuangan Daerah	Dinas Perhubungan
			Penetapan DPA	Risiko Pemangku Kebijakan : lambatnya proses pendandatangan penetapan DPA	Mitra lama dalam memproses verifikasi DPA	ROO.26.03.15.27	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	Proses cek and re-check yang masih berlangsung (methode)	Internal	C	Memperlambat penyusunan dokumen administrasi Keuangan Daerah	Dinas Perhubungan
			Verifikasi berkas dari bidang	Risiko Operasional :Berkas dari Bidang Tidak Lengkap	Staff di bidang tidak lengkap dalam menyetorkan berkas	ROO.26.03.15.27	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	Kurangnya ketelitian petugas dalam proses pemenuhan dokumen (man)	Internal	C	Memperlambat penyusunan dokumen administrasi Keuangan Daerah	Dinas Perhubungan
			Pencairan Anggaran yang ada di DPA	Risiko Operasional : Terdapat Kesalahan Input Nominal Pencairan	Staff melakukan kesalahan dalam proses input	ROO.26.03.15.27	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	Kurangnya ketelitian petugas dalam proses pemenuhan dokumen (man)	Eksternal	C	Memperlambat penyusunan dokumen administrasi Keuangan Daerah	Dinas Perhubungan
			Penginputan data ke sistem	Risiko Operasional: Human error dalam penginputan data	Staff melakukan kesalahan dalam proses input	ROO.26.03.15.27	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	Kurangnya ketelitian petugas dalam proses pemenuhan dokumen (man)		C	Memperlambat penyusunan dokumen administrasi Keuangan Daerah	Dinas Perhubungan

No	Kegiatan	Indikator	Tahapan	Risiko	Sebab	C/UC	Dampak	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
				Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode	Pemilik					
						Risiko						
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kuantitas dan kualitas layanan administrasi kepegawaian	Verifikasi jabatan yang dibutuhkan	Risiko Operasional : Kurangnya pelatihan pada ASN	ASN kurang mendapatkan pelatihan	ROO.26.03.15.27	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Terbatasnya anggaran yang tersedia (Methode)	Internal	C	Rendahnya kompetensi kualitas SDM	Dinas Perhubungan
			Pengadaan dan penempatan pegawai	Risiko Pemangku Kebijakan : Tidak tersedianya formasi yang dibutuhkan	Mitra tidak membuka formasi yang dibutuhkan	ROO.26.03.15.27	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Terbatasnya pengadaan ASN yg dilaksanakan secara berkala (Man)	Internal	C	Memperlambat hasil kinerja	Dinas Perhubungan
			Penetapan DPA diklat	Risiko Operasional : Minimnya anggaran diklat yang tersedia	Instansi memiliki anggaran terbatas	ROO.26.03.15.27	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Terbatasnya Anggaran Diklat untuk pendidikan dan pelatihan (Money)	Internal	C	Diklat tidak bisa dilakukan secara berkala	Dinas Perhubungan
			Evaluasi dan kualitas pelayanan	Risiko Kebijakan : Tidak adanya SOP	Instansi belum membuat SOP	ROO.26.03.15.27	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku (Material)	Eksternal	C	Lemahnya layanan kepegawaian	Dinas Perhubungan
			Pengelolaan data dan informasi kepegawaian	Risiko Operasional : Penginputan dilakukan secara manual	Staff melakukan input data secara manual	ROO.26.03.15.27	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Terbatasnya peralatan IT yang tersedia (Machine)		C	Tidak tertibnya administrasi kepegawaian	Dinas Perhubungan
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penginputan Data	Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perangkat daerah	Risiko Operasional : Rendahnya pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Petugas memiliki etos melayani rendah	ROO.26.03.15.27	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kurangnya koordinasi pelayanan administrasi umum perangkat daerah (Material)	Internal	C	Kualitas pelayanan tidak sinkron	Dinas Perhubungan
			Ketidaksihinggaan Kompetensi	Risiko Operasional : Pegawai tidak memiliki keterampilan yang diperlukan (SDM PPJB)	Petugas tidak memiliki keterampilan yang diperlukan	ROO.26.03.15.27	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kurangnya SDM PPJB yang kompeten karena tidak mengikuti diklat (Man)	Internal	C	Terlambatnya pembuatan dokumen	Dinas Perhubungan

No	Kegiatan	Indikator	Tahapan	Risiko	Sebab	C/UC	Dampak	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
				Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode	Pemilik					
						Risiko						
			Perencanaan Anggaran yang Tidak Akurat	Risiko Operasional : Realisasi anggaran tidak sesuai perencanaan	Instansi tidak melakukan realisasi anggaran sesuai perencanaan	ROO.26.03.15.27	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Terbatasnya ketersediaan anggaran yang tersedia (Money)	Internal	C	Kegiatan tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal	Dinas Perhubungan
			Kelemahan sistem informasi	Risiko Operasional : Human error dalam penginputan data	Petugas lali dalam proses input data	ROO.26.03.15.27	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Terbatasnya peralatan IT (Machine)	Internal	C	Penyusunan dokumen tidak bisa dilakukan dengan sistematis	Dinas Perhubungan
			Proses Manual yang Inefisien	Risiko Operasional : Ketergantungan pada proses manual	Petugas melakukan proses secara manual	ROO.26.03.15.27	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Proses yang berbelit-belit (Methode)		C	Pelayanan jadi terlambat	Dinas Perhubungan
5	Pengadaan Barang Milik Daerah	Penginputan Data	Pembuatan Rencana Kebutuhan	Risiko Fraud : Memanipulasi kebutuhan yang diusulkan	Petugas melakukan manipulasi kebutuhan yang diusulkan	ROO.26.03.15.27	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kurangnya transparansi dalam proses kegiatan (Material)	Internal	C	Pengadaan tidak sesuai spesifikasi yang diinginkan	Dinas Perhubungan
			Verifikasi Kebutuhan	Risiko Operasional : Kurangnya ketelitian dalam proses verifikasi	Petugas kurang teliti dalam proses verifikasi	ROO.26.03.15.27	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kurangnya SDM PPJB yang kompeten (Man)	Internal	C	Terlambatnya pembuatan dokumen	Dinas Perhubungan
			Perencanaan dalam pengadaan	Risiko Fraud : Kurang adanya transparansi dalam penggunaan anggaran	Bidang/Bagian kurang transparan dalam penggunaan anggaran	ROO.26.03.15.27	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Terjadinya pembekakan biaya (cost overrun) (Money)	Internal	C	Kegiatan tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal	Dinas Perhubungan
			Penggunaan teknologi dalam pelaksanaan kegiatan	Risiko Operasional: Gangguan teknis dalam pelaksanaan kegiatan	Adanya gangguan teknis sarana penunjang	ROO.26.03.15.27	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Terbatasnya peralatan pendukung (Machine)	Eksternal	C	Penyusunan dokumen tidak bisa dilakukan dengan sistematis	Dinas Perhubungan

No	Kegiatan	Indikator	Tahapan	Risiko	Sebab	C/UC	Dampak	Uraian	Sumber	Uraian	Pihak yang Terkena	
				Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode	Pemilik					
						Risiko						
			Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan efisiensi	Risiko Operasional : Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan	Petugas melakukan kegiatan tidak sesuai ketentuan	ROO.26.03.15.27	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Tidak adanya SOP dalam pelaksanaan (Methode)		C	Terlambatnya proses pelaksanaan kegiatan	Dinas Perhubungan
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penginputan Data	Identifikasi kebutuhan	Risiko Operasional : Kurangnya data kebutuhan yang akurat	Data kurang akurat	ROO.26.03.15.27	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Pengerjaan data dilakukan dengan manual (Material)	Internal	C	Terlambatnya proses pembuatan dokumen kegiatan	Dinas Perhubungan
			Terbatasnya Sumber Daya Manusia	Risiko Operasional : Rendahnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi dibidang tersebut	Petugas kurang memiliki kompetensi terkait	ROO.26.03.15.27	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kurangnya adanya pelatihan (Man)	Internal	C	Penyusunan dokumen tidak bisa dilakukan dengan sistematis	Dinas Perhubungan
			Penatausahaan Keuangan	Risiko Operasional : Keterlambatan pembayaran tagihan	Petugas lalai dalam proses pembayaran	ROO.26.03.15.27	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kurangnya Komunikasi antar pihak (Money)	Eksternal	C	Terlambatnya proses pencairan kegiatan	Dinas Perhubungan
			Ketergantungan Teknologi	Risiko Operasional : Ketergantungan berlebihan pada sistem tertentu	petugas memiliki ketergantungan pada sistem tertentu	ROO.26.03.15.27	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Terlalu banyaknya yang mengakses secara bersamaan (Machine)	Internal	C	Jika sistem down, operasional terhenti	Dinas Perhubungan
			Ketidaksesuaian Prosedur Kegiatan	Risiko Fraud : Proses pelaksanaan kegiatan tidak mengikuti peraturan yang ditentukan	Petugas mengabaikan SOP yang berlaku	ROO.26.03.15.27	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Tidak adanya ketentuan yang baku (Methode)	Internal	C	Terlambatnya proses pencairan kegiatan	Dinas Perhubungan

No	Kegiatan	Indikator	Tahapan	Risiko	Sebab	C/UC	Dampak	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
				Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode	Pemilik					
						Risiko						
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penginputan Data	Tidak adanya kesesuaian spesifikasi	Risiko Operasional : Kualitas peralatan tidak sesuai dengan yang diinginkan	Peralatan kurang menunjang pekerjaan	ROO.26.03.15.27	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kurangnya komunikasi dengan pihak penyedia (Material)	Eksternal	C	Kualitas peralatan cepat rusak	Dinas Perhubungan
			Keterbatasan/Ke tidaksesuaian SDM	Risiko Operasional : Kurangnya personel yang kompeten atau tidak sesuai keahliannya dengan kebutuhan jasa	Petugas kurang kompeten dalam suatu keahlian	ROO.26.03.15.27	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Penempatan personel yang tidak sesuai dengan keahliannya (Man)	Internal	C	Ketidakefektifan pelaksanaan tugas	Dinas Perhubungan
			Pelaksanaan kegiatan	Risiko Operasional : Keterlambatan pencairan dana	Petugas lambat dalam melakukan proses pencairan	ROO.26.03.15.27	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Prosedur administrasi keuangan yang panjang (Money)	Internal	C	Keterlambatan pembayaran ke penyedia jasa/mitra kerja	Dinas Perhubungan
			Deteksi peralatan secara berkala	Risiko Operasional : Kerusakan peralatan utama	Peralatan mengalami kerusakan	ROO.26.03.15.27	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Penggunaan yang tidak sesuai prosedur (Machine)	Internal	C	Biaya perbaikan yang tinggi	Dinas Perhubungan
			Kurangnya Standar Kualitas	Risiko Operasional : Tidak adanya tolok ukur yang jelas untuk menilai hasil pekerjaan penyedia jasa	SOP tidak tersedia atau indikator penilaian tidak tersedia	ROO.26.03.15.27	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Belum adanya SOP yang baku (Methode)	Internal	C	Kualitas layanan penunjang rendah, ketidakpuasan pengguna layanan	Dinas Perhubungan
8	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten	Terpasangnya Perlengkapan Sesuai Target	Penentuan titik pemasangan.	Risiko Operasioanl : Kesalahan dalam penentuan titik koordinat.	Petugas melakukan kesalahan teknis	ROO.26.03.15.27	Kasi Perlengkapan Jalan	Kurang presisinya dalam penentuan titik koordinat (Methode)	Eksternal	C	Menyebabkan gangguan jarak pandang	Dinas Perhubungan

No	Kegiatan	Indikator	Tahapan	Risiko	Sebab	C/UC	Dampak	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
				Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode	Pemilik					
						Risiko						
			Penyusunan Rencana Anggaran (RAB):	Risiko Fraud : Adanya data inventaris yang tidak valid	Petugas melakukan input data yang tidak valid	ROO.26.03.15.27	Kasi Perlengkapan Jalan	Perubahan harga bahan baku (baja/cat) (Money)	Eksternal	C	Terlambatnya proses penyusunan laporan	Dinas Perhubungan
			Proses Pengadaan Barang	Risiko Operasional : Potensi penyerahan barang menggunakan barang rekondisi	Petugas melakukan kelalaian	ROO.26.03.15.27	Kasi Perlengkapan Jalan	Tidak adanya Standar Barang yang baku atau kurang akurat sebagai dasar perencanaan (Material)	Eksternal	C	Terlambatnya proses pengadaan	Dinas Perhubungan
			Mobilisasi & Pemasangan	Risiko Operasional : Adanya kecelakaan fisik pekerja	Petugas mengalami kecelakaan kerja	ROO.26.03.15.27	Kasi Perlengkapan Jalan	Kecelakaan kerja akibat petugas tidak memahami prosedur K3 di jalan (Man)	Eksternal	C	Terlambatnya proses pelaksanaan pemasangan	Dinas Perhubungan
			Serah Terima Pekerjaan	Risiko Operasional : Kesalahan dalam uji fungsi hasil pasang	Hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi awal	ROO.26.03.15.27	Kasi Perlengkapan Jalan	Sistem pengujian masih bersifat manual (Machine)	Eksternal	C	Menyebabkan gangguan yang kurang sesuai dengan spektek	Dinas Perhubungan
9	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Penyusunan Data Perencanaan	Risiko Operasional : Petugas kurang memahami dokumen perencanaan	Petugas kurang memahami tupoksi	ROO.26.03.15.27	Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan	Kurangnya pemahaman staf bidang terkait permintaan data yang dimaksud (Man)	Eksternal	C	Terjadinya kesalahan pemenuhan data karena data yang disampaikan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diminta	Dinas Perhubungan
			Melakukan Sosialisasi	Risiko Pemangku Kebijakan : Lambatnya pemenuhan data dan informasi yang menyebabkan keterlambatan proses perizinan	Mitra kerja lambat dalam proses pemenuhan data	ROO.26.03.15.27	Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan	Kurangnya pemahaman staf bidang terkait permintaan data yang dimaksud (Man)	Eksternal	C	Terulangnya permintaan perbaikan data sehingga memperlambat proses kerja dan penyelesaian laporan	Dinas Perhubungan
			Verifikasi permohonan	Risiko Fraud : Terjadinya manipulasi data	Petugas melakukan manipulasi data	ROO.26.03.15.27	Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan	Kurangnya Pengawasan dan proses verifikasi	Eksternal	C	Data dan dokumen yang dihasilkan tidak	Dinas Perhubungan

No	Kegiatan	Indikator	Tahapan	Risiko	Sebab	C/UC	Dampak	Uraian	Sumber	Uraian	Pihak yang Terkena	
				Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode	Pemilik					
						Risiko						
				yang tidak sesuai oleh pihak terkait dalam proses verifikasi permohonan.	dengan sengaja			yang belum optimal (Man)			tervalidasi dengan baik sehingga berisiko menimbulkan kesalahan administratif.	
			Penilaian teknis	Risiko Operasional: Format dan substansi data teknis yang disampaikan tidak sesuai sehingga menghambat proses penilaian.	Tidak adanya indikator penilaian	ROO.26.03.15.27	Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan	Tidak Ada Template untuk pengisian database (Material)	Eksternal	C	Ketidakteraturan dan ketidakkonsistena n format database yang menyulitkan proses pengolahan dan analisis data	Dinas Perhubun gan
			Peninjauan lapangan	Risiko Operasional :Kurang telitinya petugas dalam melakukan peninjauan lapangan .	Petugas kurang teliti dalam peninjauan kegiatan	ROO.26.03.15.27	Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan	Petugas Verifikasi Kurang teliti dalam proses verifikasi (Man)	Eksternal	C	Ketidakteraturan dan ketidakkonsistena n format database yang menyulitkan proses pengolahan dan analisis data	Dinas Perhubun gan
			Penerbitan izin	Risiko Operasional : Kurang telitinya petugas dalam melakukan pemeriksaan akhir dokumen izin sehingga terjadi kesalahan dalam penerbitan izin.	Petugas kurang teliti dalam peninjauan kegiatan	ROO.26.03.15.27	Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan	Petugas Verifikasi Kurang teliti dalam proses verifikasi (Man)	Eksternal	C	Meningkatnya potensi kesalahan berulang karena proses verifikasi tidak dilakukan secara cermat	Dinas Perhubun gan
			Pelaporan dan monitoring	Risiko Operasional : Keterlambatan penyusunan laporan dan kegiatan monitoring akibat lambatnya penyampaian data pendukung.	Petugas kurang cepat dalam proses pembuatan dan penyusunan laporan	ROO.26.03.15.27	Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan	Koordinasi Internal Bidang yang Masih Berlangsung dan melebihi deadline yang telah ditentukan (Man)	Eksternal	C	Keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan pelaporan akibat koordinasi internal yang melebihi batas waktu	Dinas Perhubun gan
10	Pengujian Berkala Kendaraan	Jumlah Kendaraan Bermotor yang	Mengajukan Permohonan Pelaksanaan	Risiko informasi tata cara dan persyaratan tidak	Pemilik kendaraan bermotor melakukan	ROO.26.03.15.27	KUPT Pengujian Kendaraan	Kurangnya informasi tata cara dan persyaratan	Internal	C	Pendaftaran tidak dapat diproses	Pemilik kendaraan bermotor

No	Kegiatan	Indikator	Tahapan	Risiko	Sebab	C/UC	Dampak	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
				Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode	Pemilik					
						Risiko						
	Bermotor	Teruji Secara Berkala	Pendaftaran Kendaraan Bermotor Wajib Uji Berkala di Loker Pendaftaran	tersedia	permohonan Pengujian Kendaraan Bermotor		Bermotor					yang mengujikan kendaraannya
			Memeriksa dan memastikan kesesuaian kelengkapan pendaftaran serta memastikan kehadiran kendaraan yang akan didaftarkan uji	Risiko persyaratan pendaftaran tidak lengkap	Operator melakukan verifikasi permohonan Pengujian Kendaraan Bermotor	ROO.26.03.15.27	KUPT Pengujian Kendaraan Bermotor	Kurangnya informasi tata cara dan persyaratan	Internal	C	Pendaftaran tidak dapat diproses	Pemilik kendaraan bermotor yang mengujikan kendaraannya
			Memeriksa kendaraan bermotor sesuai data yang tercantum dalam hasil pemeriksaan administrasi dengan fisik kendaraan	Risiko kendaraan tidak laik jalan	Penguji Kendaraan Bermotor melakukan kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor	ROO.26.03.15.27	KUPT Pengujian Kendaraan Bermotor	Kendaraan perlu perbaikan	Internal	C	Keselamatan pengguna kendaraan bermotor	Pemilik kendaraan bermotor yang mengujikan kendaraannya
			Memasukkan ke database aplikasi SIMPKB, Membuat kartu induk uji berkala, Memberikan nomor uji kendaraan, Menerbitkan bukti pendaftaran kendaraan bermotor wajib uji berkala	Risiko ketersediaan jaringan internet terputus	Penguji menentukan hasil uji dan operator melakukan cetak bukti lulus uji	ROO.26.03.15.27	KUPT Pengujian Kendaraan Bermotor	Faktor cuaca	Eksternal	C	Cetak bukti lulus uji tidak dapat diproses	Pengguna kendaraan bermotor
11	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian	Penyusunan dan atau perencanaan	Risiko Operasional : kurangnya sdm dalam pemahaman	Staf terlambat dalam menyelesaikannya	ROO.26.03.15.27	Kepala Bidang Angkutan	Perlunya pelatihan terhadap SDM bidang	Internal	C	Ketidaktepatan dalam melaksanakan	Dinas Perhubungan

No	Kegiatan	Indikator	Tahapan	Risiko	Sebab	C/UC	Dampak	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
				Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode	Pemilik					
						Risiko						
	Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Efektivas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota	kegiatan survey	sistem perencanaan kegiatan				perencanaan kegiatan (Methode)			penyusunan perencanaan dan pelaporan kegiatan	
			Pengumpulan data primer dan data sekunder	Risiko Operasional : Kesalahan dalam pengumpulan data	Petugas kurang memahamai dalam pengumpulan data	ROO.26.03.15.27	Kepala Bidang Angkutan	Banyaknya data yang perlu dikumpulkan (Methode)	Eksternal	C	Tertundanya pengumpulan data	Dinas Perhubungan
			Input data primer dan data sekunder	Risiko Operasional : Gangguan sistem atau perangkat lunak	Petugas kesulitan dalam input data	ROO.26.03.15.27	Kepala Bidang Angkutan	Perangkat lunak yang belum terupdate (Material)	Eksternal	C	Pekerjaan tertunda atau kehilangan data	Dinas Perhubungan
			Analisa data primer dan data sekunder	Risiko Operasional : Kurangnya jumlah SDM dalam menganalisis	Petugas kurang memadai dalam analisa data	ROO.26.03.15.27	Kepala Bidang Angkutan	Terbatasnya anggaran dalam memenuhi SDM (Money)	Internal	C	Kesalahan dalam menganalisis data	Dinas Perhubungan
			Penyajian data	Risiko Operasional : Keterlambatan dalam proses penyajian data	Petugas mengalami bebab kerja ganda	ROO.26.03.15.27	Kepala Bidang Angkutan	Antrian pekerjaan atau kendala teknis menyebabkan analisis terlambat (Man)	Eksternal	C	Tertundanya dalam penyajian data	Dinas Perhubungan
12	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Pengumpulan Data Lalu Lintas	Risiko Fraud : Manipulasi data survei untuk mempercepat proses	Petugas melakukan manipulasi data dengan sengaja	ROO.26.03.15.27	Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan	Pengendalian internal yang lemah dan kurangnya pengawasan lapangan dalam pelaksanaan survei (Method)	Internal	C	Hasil survei kurang akurat dan tidak mencerminkan kondisi lapangan sebenarnya.	Dinas Perhubungan
			Analisis Dampak Lalu Lintas	Risiko Operasional :Kesalahan perhitungan LOS/proyeksi lalu lintas	Petugas melakukan kesalahan dalam proses penghitungan	ROO.26.03.15.27	Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan	Kurangnya ketelitian petugas dalam melakukan perhitungan teknis serta keterbatasan kompetensi analisis lalu lintas (Man)	Internal	C	Kesalahan dalam hasil analisis teknis lalu lintas yang berpotensi menghasilkan rekomendasi yang tidak tepat.	Dinas Perhubungan
			Penyusunan Dokumen Andalalin	Risiko Operasional :Human error dalam penyusunan data	Petugas melakukan kelalaiian dalam pekerjaan	ROO.26.03.15.27	Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan	Kurangnya ketelitian petugas dalam proses penyusunan dan penginputan data	Eksternal	C	Ketidaksesuaian antara data input dengan kondisi riil yang berdampak pada rendahnya	Dinas Perhubungan

No	Kegiatan	Indikator	Tahapan	Risiko	Sebab	C/UC	Dampak	Uraian	Sumber	Uraian	Pihak yang Terkena	
				Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode	Pemilik					
						Risiko						
								(Man)			keandalan data	
			Pengajuan data	Risiko Operasional: kesalahan dalam pengajuan data	Petugas melakukan kelalaiian dalam pekerjaan	ROO.26.03.15.27	Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan	Kurangnya ketelitian petugas dalam proses pemenuhan dokumen (Man)		C	Dokumen administrasi tidak lengkap atau tidak sesuai ketentuan sehingga menghambat proses evaluasi dan audit	Dinas Perhubungan
			Melaksanakan tindakan mitigasi	Risiko Fraud : Penggunaan anggaran mitigasi tidak sesuai ketentuan	Petugas dengan sengaja menyelewengkan anggaran kegiatan	ROO.26.03.15.27	Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan	Minimnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran serta keterbatasan pemahaman terhadap ketentuan yang berlaku (Money)	Internal	C	Terjadinya penyimpangan atau ketidaktepatan penggunaan anggaran akibat lemahnya pengawasan.	Dinas Perhubungan
13	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Tahap Perencanaan	Risiko Operasional : Petugas kurang memahami dokumen audit dan inspeksi keselamatan	Petugas kurang memahami tupoksi	ROO.26.03.15.27	Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan	Terbatasnya sumber daya manusia yang mengikuti pendidikan dan pelatihan terkait audit dan inspeksi keselamatan (Man)	Internal	C	Pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan kurang optimal karena keterbatasan kompetensi petugas	Dinas Perhubungan
			Tahap Pengumpulan Data	Risiko Operasional : Petugas kurang memahami data yang akan dikaji	Petugas kurang memahami data yang dibuat	ROO.26.03.15.27	Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan	Kurangnya ketelitian petugas dalam proses pemenuhan dokumen (Man)	Internal	C	Menghambat proses verifikasi dan pelaporan.	Dinas Perhubungan
			Tahap kegiatan lapangan / PAM	Risiko Fraud : Terjadinya manipulasi data yang tidak sesuai dengan yang ada	Petugas melakukan manipulasi data dengan sengaja	ROO.26.03.15.27	Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan	Tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku dalam pengelolaan dan validasi data (Material)	Eksternal	C	Tidak adanya standar yang seragam dalam pengelolaan dan validasi data sehingga proses kerja tidak konsisten	Dinas Perhubungan
			Tahap Identifikasi Masalah Keselamatan	Risiko Operasional :Petugas kurang memahami tentang masalah yang di	Petugas kurang memahami data yang dibuat	ROO.26.03.15.27	Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan	Kurangnya ketelitian petugas dalam proses mengidentifikasi		C	Proses pengolahan data menjadi lambat dan tidak efisien	Dinas Perhubungan

No	Kegiatan	Indikator	Tahapan	Risiko	Sebab	C/UC	Dampak	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
				Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode	Pemilik					
						Risiko						
				identifikasi				masalah (Man)				
			Tahap Analisis Risiko Keselamatan	Risiko Operasional :Petugas kurang memahami tentang masalah yang di identifikasi	Petugas kurang memahami data yang dibuat	ROO.26.03.15.27	Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan	Kurangnya ketelitian petugas dalam proses mengidentifikasi masalah (Man)	Internal	C	Proses pengolahan data menjadi lambat dan tidak efisien	Dinas Perhubungan
			Tahap Penyusunan Rekomendasi	Risiko Operasional : Petugas kurang memahami dokumen rekomendasi yang akan disusun	Petugas kurang memahami data yang dibuat	ROO.26.03.15.27	Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan	Kurangnya ketelitian petugas dalam proses mengidentifikasi masalah (Man)	Internal	C	Proses pengolahan data menjadi lambat dan tidak efisien	Dinas Perhubungan
14	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	Penyusunan dan perencanaan	Risiko Operasional: Perencanaan tidak sesuai dengan kebutuhan riil	Petugas tidak akurat dalam melakukan penyusunan dan perencanaan	ROO.26.03.15.27	Kepala Bidang Angkutan	Keterbatasan sumber daya ahli perencanaan (Man)	Internal	C	Penundaan operasional, menimbulkan kerugian waktu dan finansial	Dinas Perhubungan
			Pengumpulan data	Risiko Operasional: Ketidakkuratan data yang dikumpulkan	Petugas memasukan data yang tidak valid	ROO.26.03.15.27	Kepala Bidang Angkutan	Kesalahan manusia (human error) saat entri data (Man)	Internal	C	Memperlambat dalam pengumpulan data	Dinas Perhubungan
			Monitoring secara berkala sarana dan prasana keselamatan pada pelayanan ASDP	Risiko Operasional: Tidak optimal dalam pelaksanaan monitoring	Petugas tidak bisa mengidentifikasi permasalahan secara dini	ROO.26.03.15.27	Kepala Bidang Angkutan	Keterbatasan SDM dalam pelaksanaan monitoring (Man)	Internal	C	Pemenuhan fasilitas Pelayanan ASDP jadi terhambat	Dinas Perhubungan
			Evaluasi hasil monitoring	Risiko Operasional: Terhambatnya hasil evaluasi	Staf evaluasi belum didukung dengan sisitem yang memadai	ROO.26.03.15.27	Kepala Bidang Angkutan	Kurang kompetennya tim evaluasi karena minim SDM (Man)	Internal	C	Pemenuhan fasilitas Pelayanan ASDP jadi terhambat	Dinas Perhubungan
			Sosialisasi dan melakukan peningkatan fasilitas keselamatan pelayanan ASDP	Risiko Operasional: Kurang maksimalnya peningkatan fasilitas keselamatan	Pelaku ASDP belum memiliki keselamatan yang memadai	ROO.26.03.15.27	Kepala Bidang Angkutan	Minimnya anggaran dalam pemenuhan fasilitas keselamatan pelayanan ASDP (Money)	Internal	C	Pemenuhan fasilitas Pelayanan ASDP tidak terpenuhi dengan baik	Dinas Perhubungan

No	Kegiatan	Indikator	Tahapan	Risiko	Sebab	C/UC	Dampak	Uraian	Sumber	Uraian	Pihak yang Terkena	
				Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode	Pemilik					
						Risiko						
				elayanan ASDP								
15	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang di Kabupaten/Kota yang Tersedia	Penyusunan dan atau perencanaan kegiatan	Risiko Operasional : kurangnya SDM dalam pemahaman sistem perencanaan kegiatan	Petugas terbatas dalam memahami perencanaan kegiatan	ROO.26.03.15.27	Kepala Bidang Angkutan	Perlunya pelatihan terhadap SDM bidang perencanaan penganggaran dan pelaporan kegiatan (Methode)	Internal	C	Ketidaktepatan dalam melaksanakan penyusunan perencanaan dan pelaporan kegiatan	Dinas Perhubungan
			Monitoring secara berkala sarana dan prasana keselamatan pada perlintasan sebidang	Risiko Operasional : Kuantitas SDM yang ada di Bidang Angkutan tidak memadai dibandingkan jumlah obyek yang harus di monitoring	Petugas terbatas dalam melakukan pengawasan atau monitoring	ROO.26.03.15.27	Kepala Bidang Angkutan	Banyaknya aset palang pintu namun untuk staff teknis yang mampu dalam melakukan perbaikan sangat minim (Man)	Internal	C	Tertundanya perbaikan terhadap palang pintu yang berakibat tidak dapat berfungsi secara maksimal	Dinas Perhubungan
			Dari hasil monitoring kemudian dilaksanakan perbaikan terhadap kerusakan palang pintu maupun peralatan yang lainnya	Risiko Operasional : Banyaknya laporan kerusakan tidak sebanding dengan tenaga teknis yang ada sehingga sering terjadi keterlambatan dalam penyelesaian perbaikan palang pintu	Tenaga teknis terlambat dalam menyelesaikan perbaikan palang pintu	ROO.26.03.15.27	Kepala Bidang Angkutan	Suku cadang pada peralatan palang pintu banyak yang tidak tersedia di toko lamongan (Material)	Eksternal	C	Terganggunya fungsi dan operasional palang palang pintu perlintasan	Dinas Perhubungan
			Melaksanakan pembinaan petugas dan sekaligus melaksanakan pengecekan dari hasil perbaikan yang telah dilakukan	Risiko Operasional : perlunya penambahan SDM yang khusus menangani perbaikan, monitoring dan bagian administrasi khusus pencatatan absensi dan kegiatan perbaikan serta update data	Petugas teknis dan staf merangkap tugas dalam menangani pekerjaan	ROO.26.03.15.27	Kepala Bidang Angkutan	Petugas perlu mendapatkan pelatihan agar lebih profesional dalam bidang tugasnya masing masing (Man)	Internal	C	Terganggunya pelayanan akibat Sdm yang tidak memadai dengan kebutuhan serta kecepatan penanganan peralatan yang rusak	Dinas Perhubungan
			Melaksanakan	Risiko Operasional	Tenaga teknis	ROO.26.03.	Kepala	Perlu	Internal	C	Tertundanya	Dinas

No	Kegiatan	Indikator	Tahapan	Risiko	Sebab	C/UC	Dampak	Uraian	Sumber	Uraian	Pihak yang Terkena
				Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode	Pemilik				
						Risiko					
			evaluasi secara berkala terhadap apa yang sudah dilaksanakan	: Banyaknya laporan kerusakan tidak sebanding dengan tenaga teknisi yang ada	tidak optimal dalam menangani perbaikan	15.27	Bidang Angkutan	penambahan terhadap tenaga teknis perbaikan peralatan untuk mempercepat penanganan kerusakan (Man)		perbaikan terhadap palang pintu yang berakibat tidak dapat berfungsi secara maksimal	Perhubungan

B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulan I

Berdasarkan rencana kegiatan pengelolaan risiko maka dilakukan pengendalian risiko yang terjadi pada triwulan I. Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan No. 17 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan setiap risiko yang teridentifikasi akan dilakukan pembobotan dari aspek dampak dan kemungkinan. Maka, dari pembobotan tersebut akan diketahui dari risiko tersebut perlu dilakukan RTP lebih lanjut atau risiko bisa diterima dan diatasi serta tidak memerlukan tindakan. Berikut merupakan realisasi kegiatan Pengelolaan Risiko Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan pada Triwulan satu 2026:

No	Kegiatan	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	Risiko			Analisis Risiko			Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)
			Uraian	Kode	Pemilik	Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko	
				Risiko					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Data Perencanaan	Risiko Operasional : Petugas kurang memahami dokumen perencanaan	ROO.26.03.15.27	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	2	2	4	Memberikan pemahaman kepada staf mitra bidang terkait pemahaman data
		Permintaan data ke bidang	Risiko Operasional : Lambatnya pemenuhan data dari bidang	ROO.26.03.15.27	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	2	3	6	Memberikan pemahaman kepada staf mitra bidang terkait pemahaman data
		Pengumpulan data dari bidang	Risiko Fraud : Memanipulasi data yang	ROO.26.03.15.27	Kasubag Perencanaan, Evaluasi	4	1	4	Memberikan tindakan tegas kepada yang bersangkutan apabila ditemukan data yang

No	Kegiatan	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	Risiko			Analisis Risiko			Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)
			Uraian	Kode	Pemilik	Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko	
				Risiko					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
			dikirimkan bidang		dan Keuangan				manipulatif dan tidak sesuai dengan
		Pengumpulan data dari bidang	Risiko Operasional: Format Data Tidak Sesuai Dengan Data yang diminta	ROO.26.03.15.27	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	2	2	4	Memberikan pemahaman kepada staf mitra bidang terkait pemahaman data serta memberikan gambaran template yang akan digunakan
		Verifikasi data	Risiko Operasional : kurang telitinya petugas dalam memverifikasi	ROO.26.03.15.27	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	2	2	4	Memberikan tindakan tegas kepada yang bersangkutan apabila ditemukan data yang manipulatif dan tidak sesuai dengan
		Penginputan data	Risiko Operasional	ROO.26.03.15.27	Kasubag Perencana	2	2	4	Memberikan tindakan tegas kepada yang

No	Kegiatan	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	Risiko			Analisis Risiko			Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)
			Uraian	Kode	Pemilik	Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko	
				Risiko					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
			: kurang telitinya petugas dalam memverifikasi	7	naan, Evaluasi dan Keuangan				bersangkutan apabila ditemukan data yang manipulatif dan tidak sesuai dengan
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyusunan RKA	Risiko Operasional : lambatnya bidang dalam menyusun anggarannya	ROO.26.03.15.27	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	2	3	6	Memberikan tenggat waktu terhadap masing - masing bidang dalam proses penyusunan RKA
		Penetapan DPA	Risiko Pemangku Kebijakan : lambatnya proses pendandatangan	ROO.26.03.15.27	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	2	3	6	Melakukan koordinasi secara intens kepada mitra bidang terkait

No	Kegiatan	Tahap Pelaksanaa n Kegiatan	Risiko			Analisis Risiko			Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)
			Uraian	Kode	Pemilik	Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko	
				Risiko					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
			penetapan DPA						
		Verifikasi berkas dari bidang	Risiko Operasional :Berkas dari Bidang Tidak Lengkap	ROO.26 .03.15.2 7	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	2	2	4	Memberikan pemahaman kepada staf mitra bidang terkait dokumen yang harus dipenuhi
		Pencairan Anggaran yang ada di DPA	Risiko Operasional : Terdapat Kesalahan Input Nominal Pencairan	ROO.26 .03.15.2 7	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	2	1	2	Melakukan revisi terhadap dokumen yang memiliki kesalahan
		Penginputan data ke sistem	Risiko Operasional: Human error dalam penginputan	ROO.26 .03.15.2 7	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan	2	2	4	Melakukan revisi terhadap dokumen yang memiliki kesalahan

No	Kegiatan	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	Risiko			Analisis Risiko			Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)
			Uraian	Kode	Pemilik	Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko	
				Risiko					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
			data		Keuangan				
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Verifikasi jabatan yang dibutuhkan	Risiko Operasional : Kurangnya pelatihan pada ASN	ROO.26.03.15.27	Kasubag Umum dan Kepegawaian	2	1	2	Mendorong ASN untuk mengembangkan kompetensi
		Pengadaan dan penempatan pegawai	Risiko Pemangku Kebijakan : Tidak tersedianya formasi yang dibutuhkan	ROO.26.03.15.27	Kasubag Umum dan Kepegawaian	2	1	2	Mengusulkan kebutuhan pegawai sesuai formasi yang dibutuhkan
		Penetapan DPA diklat	Risiko Operasional : Minimnya anggaran diklat yang tersedia	ROO.26.03.15.27	Kasubag Umum dan Kepegawaian	2	1	2	Pelaksanaan diklat tidak bisa dilaksanakan secara berkala
		Evaluasi dan	Risiko	ROO.26	Kasubag	2	1	2	Dilakukan evaluasi

No	Kegiatan	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	Risiko			Analisis Risiko			Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)
			Uraian	Kode	Pemilik	Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko	
				Risiko					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
		kualitas pelayanan	Kebijakan : Tidak adanya SOP	.03.15.27	Umum dan Kepegawaian				secara berkala
		Pengelolaan data dan informasi kepegawaian	Risiko Operasional : Penginputan dilakukan secara manual	ROO.26.03.15.27	Kasubag Umum dan Kepegawaian	2	1	2	Penambahan peralatan IT untuk ASN
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perangkat daerah	Risiko Operasional : Rendahnya pelayanan administrasi umum perangkat daerah	ROO.26.03.15.27	Kasubag Umum dan Kepegawaian	2	1	2	Menyamakan persepsi dalam meningkatkan pelayanan administrasi umum perangkat daerah
		Ketidaksiharian	Risiko Operasional	ROO.26.03.15.27	Kasubag Umum	2	1	2	Mendorong ASN untuk

No	Kegiatan	Tahap Pelaksanaa n Kegiatan	Risiko			Analisis Risiko			Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)
			Uraian	Kode	Pemilik	Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko	
				Risiko					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
		Kompetensi	: Pegawai tidak memiliki keterampilan yang diperlukan (SDM PPJB)	7	dan Kepega waian				mengembangkan kompetensi dibidang Pengadaan Barang dan Jasa
		Perencanaa n Anggaran yang Tidak Akurat	Risiko Operasional : Realisasi anggaran tidak sesuai perencanaan	ROO.26 .03.15.2 7	Kasubag Umum dan Kepega waian	2	1	2	Memaksimalkan anggaran yang tersedia
		Kelemahan sistem informasi	Risiko Operasional : Human error dalam penginputan data	ROO.26 .03.15.2 7	Kasubag Umum dan Kepega waian	2	1	2	Dilakukan perbaikan sistem secara berkala
		Proses	Risiko	ROO.26	Kasubag	2	1	2	Membuat system

No	Kegiatan	Tahap Pelaksanaa n Kegiatan	Risiko			Analisis Risiko			Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)
			Uraian	Kode	Pemilik	Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko	
				Risiko					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
		Manual yang Inefisien	Operasional : Ketergantungan pada proses manual	.03.15.27	Umum dan Kepegawaian				yang lebih efisien
5	Pengadaan Barang Milik Daerah	Pembuatan Rencana Kebutuhan	Risiko Fraud : Memanipulasi kebutuhan yang diusulkan	ROO.26 .03.15.27	Kasubag Umum dan Kepegawaian	2	1	2	Dilakukan indentifikasi dan verifikasi secara berkala
		Verifikasi Kebutuhan	Risiko Operasional : Kurangnya ketelitian dalam proses verifikasi	ROO.26 .03.15.27	Kasubag Umum dan Kepegawaian	2	1	2	Dilakukan Pendidikan dan Pelatihan terkait PPBJ
		Perencanaan dalam	Risiko Fraud : Kurang	ROO.26 .03.15.27	Kasubag Umum	2	1	2	Dilakukan pengawasan secara

No	Kegiatan	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	Risiko			Analisis Risiko			Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)
			Uraian	Kode	Pemilik	Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko	
				Risiko					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
		pengadaan	adanya transparansi dalam penggunaan anggaran	7	dan Kepegawaian				berkala
		Penggunaan teknologi dalam pelaksanaan kegiatan	Risiko Operasional: Gangguan teknis dalam pelaksanaan kegiatan	ROO.26 .03.15.2 7	Kasubag Umum dan Kepegawaian	2	1	2	Memastikan ketersediaan infrastuktur teknologi
		Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan efisiensi	Risiko Operasional : Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan	ROO.26 .03.15.2 7	Kasubag Umum dan Kepegawaian	2	1	2	Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Identifikasi kebutuhan	Risiko Operasional	ROO.26 .03.15.2	Kasubag Umum	2	1	2	Pembuatan dokumen dilakukan dengan

No	Kegiatan	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	Risiko			Analisis Risiko			Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)
			Uraian	Kode	Pemilik	Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko	
				Risiko					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
	Pemerintah Daerah		: Kurangnya data kebutuhan yang akurat	7	dan Kepegawaian				systematis
		Terbatasnya Sumber Daya Manusia	Risiko Operasional : Rendahnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi dibidang tersebut	ROO.26 .03.15.27	Kasubag Umum dan Kepegawaian	2	1	2	Dilakukan pelatihan secara berkala dan disiapkan regenerasi yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan
		Penatausahaan Keuangan	Risiko Operasional : Keterlambatan pembayaran	ROO.26 .03.15.27	Kasubag Umum dan Kepegawaian	2	1	2	Memastikan kelengkapan dokumen tagihan tepat waktu dan mempercepat proses verifikasi

No	Kegiatan	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	Risiko			Analisis Risiko			Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)
			Uraian	Kode	Pemilik	Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko	
				Risiko					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
			tagihan						pembayaran
		Ketergantungan Teknologi	Risiko Operasional : Ketergantungan berlebihan pada sistem tertentu	ROO.26 .03.15.27	Kasubag Umum dan Kepegawaian	2	1	2	Pelatihan teknis bagi pengguna, dan dukungan IT yang responsif
		Ketidaksesuaian Prosedur Kegiatan	Risiko Fraud : Proses pelaksanaan kegiatan tidak mengikuti peraturan yang ditentukan	ROO.26 .03.15.27	Kasubag Umum dan Kepegawaian	2	1	2	Penyusunan pedoman/SOP yang jelas
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Tidak adanya kesesuaian	Risiko Operasional : Kualitas	ROO.26 .03.15.27	Kasubag Umum dan	2	1	2	Dilakukan verifikasi guna meminimalisir ketidaksesuaian

No	Kegiatan	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	Risiko			Analisis Risiko			Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)
			Uraian	Kode	Pemilik	Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko	
				Risiko					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
	Urusan Pemerintah Daerah	spesifikasi	peralatan tidak sesuai dengan yang diinginkan		Kepegawaian				spesifikasi yang diinginkan
		Keterbatasan/Ketidaksiuaian SDM	Risiko Operasional : Kurangnya personel yang kompeten atau tidak sesuai keahliannya dengan kebutuhan jasa	ROO.26.03.15.27	Kasubag Umum dan Kepegawaian	2	1	2	Penempatan staf berdasarkan kompetensi
		Pelaksanaan kegiatan	Risiko Operasional : Keterlambatan	ROO.26.03.15.27	Kasubag Umum dan Kepegawaian	2	1	2	Percepatan proses verifikasi dokumen

No	Kegiatan	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	Risiko			Analisis Risiko			Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)
			Uraian	Kode	Pemilik	Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko	
				Risiko					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
			an pencairan dana		waian				
		Deteksi peralatan secara berkala	Risiko Operasional : Kerusakan peralatan utama	ROO.26 .03.15.27	Kasubag Umum dan Kepegawaian	2	1	2	Dilakukan deteksi dini peralatan mesin yang tersedia
		Kurangnya Standar Kualitas	Risiko Operasional : Tidak adanya tolok ukur yang jelas untuk menilai hasil pekerjaan penyedia jasa	ROO.26 .03.15.27	Kasubag Umum dan Kepegawaian	2	1	2	Menyusun dan mengesahkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan terperinci
8	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan	Penentuan titik pemasangan	Risiko Operasioanl : Kesalahan	ROO.26 .03.15.27	Kasi Perlengkapan	2	1	2	Melakukan koordinasi dan verifikasi titik oleh tim

No	Kegiatan	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	Risiko			Analisis Risiko			Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)
			Uraian	Kode	Pemilik	Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko	
				Risiko					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
	Kabupaten	.	dalam penentuan titik koordinat.		Jalan				teknis
		Penyusunan Rencana Anggaran (RAB):	Risiko Fraud : Adanya data inventaris yang tidak valid	ROO.26 .03.15.2 7	Kasi Perencanaan Jalan	2	2	4	Pencantuman klausul harga eskalasi atau menggunakan harga satuan terbaru dari SHSR.
		Proses Pengadaan Barang	Risiko Operasional : Potensi penyerahan barang menggunakan barang rekondisi	ROO.26 .03.15.2 7	Kasi Perencanaan Jalan	1	1	1	Melakukan inspeksi dan koordinasi sebelum pengiriman barang dilakukan
		Mobilisasi & Pemasangan	Risiko Operasional : Adanya	ROO.26 .03.15.2 7	Kasi Perencanaan	2	3	6	Pelatihan singkat K3 dan pengawasan ketat

No	Kegiatan	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	Risiko			Analisis Risiko			Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)
			Uraian	Kode	Pemilik	Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko	
				Risiko					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
			kecelakaan fisik pekerja		Jalan				
		Serah Terima Pekerjaan	Risiko Operasional : Kesalahan dalam uji fungsi hasil pasang	ROO.26 .03.15.2 7	Kasi Perlengkapan Jalan	1	1	1	Penggunaan alat yang sudah termodernisasi
9	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Penyusunan Data Perencanaan	Risiko Operasional : Petugas kurang memahami dokumen perencanaan	ROO.26 .03.15.2 7	Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan	2	2	4	Memberikan pemahaman kepada staf mitra bidang terkait pemahaman data
		Melakukan Sosialisasi	Risiko Pemangku Kebijakan : Lambatnya pemenuhan	ROO.26 .03.15.2 7	Bidang Lalu Lintas dan Keselam	2	3	6	Memberikan pemahaman kepada staf mitra bidang terkait pemahaman data

No	Kegiatan	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	Risiko			Analisis Risiko			Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)
			Uraian	Kode	Pemilik	Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko	
				Risiko					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
			data dan informasi yang menyebabkan keterlambatan proses perizinan		atan				
		Verifikasi permohonan	Risiko Fraud : Terjadinya manipulasi data yang tidak sesuai oleh pihak terkait dalam proses verifikasi permohonan .	ROO.26 .03.15.27	Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan	4	1	4	Memberikan tindakan tegas kepada yang bersangkutan apabila ditemukan data yang manipulatif dan tidak sesuai dengan
		Penilaian teknis	Risiko Operasional:	ROO.26 .03.15.2	Bidang Lalu	2	2	4	Memberikan pemahaman kepada

No	Kegiatan	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	Risiko			Analisis Risiko			Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)
			Uraian	Kode	Pemilik	Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko	
				Risiko					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
			Format dan substansi data teknis yang disampaikan tidak sesuai sehingga menghambat proses penilaian.	7	Lintas dan Keselamatan				staf mitra bidang terkait pemahaman data serta memberikan gambaran template yang akan digunakan
		Peninjauan lapangan	Risiko Operasional :Kurang telitinya petugas dalam melakukan peninjauan lapangan .	ROO.26 .03.15.2 7	Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan	2	2	4	Memberikan tindakan tegas kepada yang bersangkutan apabila ditemukan data yang manipulatif dan tidak sesuai dengan
		Penerbitan izin	Risiko Operasional	ROO.26 .03.15.2	Bidang Lalu	2	2	4	Memberikan tindakan tegas kepada yang

No	Kegiatan	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	Risiko			Analisis Risiko			Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)
			Uraian	Kode	Pemilik	Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko	
				Risiko					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
			: Kurang telitinya petugas dalam melakukan pemeriksaan akhir dokumen izin sehingga terjadi kesalahan dalam penerbitan izin.	7	Lintas dan Keselamatan				bersangkutan apabila ditemukan data yang manipulatif dan tidak sesuai dengan
		Pelaporan dan monitoring	Risiko Operasional : Keterlambatan penyusunan	ROO.26.03.15.27	Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan	2	3	6	Memberikan tenggat waktu terhadap masing - masing bidang dalam proses penyusunan RKA

No	Kegiatan	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	Risiko			Analisis Risiko			Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)
			Uraian	Kode	Pemilik	Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko	
				Risiko					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
			laporan dan kegiatan monitoring akibat lambatnya penyampaian data pendukung.						
10	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Mengajukan Permohonan Pelaksanaan Pendaftaran Kendaraan Bermotor Wajib Uji Berkala di Loker Pendaftaran	Risiko informasi tata cara dan persyaratan tidak tersedia	ROO.26.03.15.27	KUPT Pengujian Kendaraan Bermotor	1	3	3	Pemasangan papan informasi
		Memeriksa dan memastikan	Risiko persyaratan pendaftaran	ROO.26.03.15.27	KUPT Pengujian	1	3	3	Mengembalikan berkas permohonan untuk dilengkapi oleh

No	Kegiatan	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	Risiko			Analisis Risiko			Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)
			Uraian	Kode	Pemilik	Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko	
				Risiko					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
		kesesuaian kelengkapan pendaftaran serta memastikan kehadiran kendaraan yang akan didaftarkan uji	tidak lengkap		Kendaraan Bermotor				pemilik kendaraan
		Memeriksa kendaraan bermotor sesuai data yang tercantum dalam hasil pemeriksaan administrasi dengan fisik kendaraan	Risiko kendaraan tidak laik jalan	ROO.26 .03.15.2 7	KUPT Pengujian Kendaraan Bermotor	1	2	2	Mengembalikan kendaraan untuk dilakukan perbaikan dan pemenuhan persyaratan laik jalan & Sosialisasi Kendaraan Bermotor Berkeselamatan

No	Kegiatan	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	Risiko			Analisis Risiko			Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)
			Uraian	Kode	Pemilik	Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko	
				Risiko					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
		Memasukan ke database aplikasi SIMPKB, Membuat kartu induk uji berkala, Memberikan nomor uji kendaraan, Menerbitkan bukti pendaftaran kendaraan bermotor wajib uji berkala	Risiko ketersediaan jaringan internet terputus	ROO.26 .03.15.2 7	KUPT Pengujian Kendaraan Bermotor	4	2	8	Menjaga dan memelihara peralatan yang berhubungan dengan jaringan internet
11	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu	Penyusunan dan atau perencanaan kegiatan	Risiko Operasional : kurangnya sdm dalam	ROO.26 .03.15.2 7	Kepala Bidang Angkutan	2	2	4	Dilakukan pembagian tugas sesuai tingkat pemahaman

No	Kegiatan	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	Risiko			Analisis Risiko			Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)
			Uraian	Kode	Pemilik	Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko	
				Risiko					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
	Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	survay	pemahaman sistem perencanaan kegiatan						
		Pengumpulan data primer dan data sekunder	Risiko Operasional : Kesalahan dalam pengumpulan data	ROO.26.03.15.27	Kepala Bidang Angkutan	2	3	6	Dilakukan penetapan standar dan klasifikasi data yang jelas dan penetapan prioritas data yang bersifat utama
		Input data primer dan data sekunder	Risiko Operasional : Gangguan sistem atau perangkat lunak	ROO.26.03.15.27	Kepala Bidang Angkutan	2	2	4	Pemantauan kondisi sistem, serta pencadangan data (backup) secara rutin
		Analisa data primer dan data sekunder	Risiko Operasional : Kurangnya jumlah SDM	ROO.26.03.15.27	Kepala Bidang Angkutan	2	1	2	Optimalisasi pemanfaatan SDM yang ada melalui pembagian tugas

No	Kegiatan	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	Risiko			Analisis Risiko			Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)
			Uraian	Kode	Pemilik	Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko	
				Risiko					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
			dalam menganalisis						yang jelas
		Penyajian data	Risiko Operasional : Keterlambatan dalam proses penyajian data	ROO.26.03.15.27	Kepala Bidang Angkutan	2	2	4	Dilakukan pengaturan prioritas pekerjaan berdasarkan urgensi dan tenggat waktu
12	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Pengumpulan Data Lalu Lintas	Risiko Fraud : Manipulasi data survei untuk mempercepat proses	ROO.26.03.15.27	Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan	2	3	6	Melakukan koordinasi secara intens kepada mitra bidang terkait
		Analisis Dampak Lalu Lintas	Risiko Operasional :Kesalahan	ROO.26.03.15.27	Bidang Lalu Lintas	2	2	4	Memberikan pemahaman kepada staf mitra bidang

No	Kegiatan	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	Risiko			Analisis Risiko			Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)
			Uraian	Kode	Pemilik	Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko	
				Risiko					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
			perhitungan LOS/proyeksi lalu lintas		dan Keselamatan				terkait dokumen yang harus dipenuhi
		Penyusunan Dokumen Andalalin	Risiko Operasional :Human error dalam penyusunan data	ROO.26 .03.15.27	Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan	2	1	2	Melakukan revisi terhadap dokumen yang memiliki kesalahan
		Pengajuan data	Risiko Operasional: kesalahan dalam pengajuan data	ROO.26 .03.15.27	Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan	2	2	4	Melakukan revisi terhadap dokumen yang memiliki kesalahan

No	Kegiatan	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	Risiko			Analisis Risiko			Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)
			Uraian	Kode	Pemilik	Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko	
				Risiko					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
		Melaksanakan tindakan mitigasi	Risiko Fraud : Penggunaan anggaran mitigasi tidak sesuai ketentuan	ROO.26.03.15.27	Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan	2	2	4	Memberikan tindakan tegas kepada yang bersangkutan apabila ditemukan data yang manipulatif dan tidak sesuai dengan
13	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Tahap Perencanaan	Risiko Operasional : Petugas kurang memahami dokumen audit dan inspeksi keselamatan	ROO.26.03.15.27	Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan	2	3	6	Melakukan koordinasi secara intens kepada mitra bidang terkait
		Tahap Pengumpulan Data	Risiko Operasional : Petugas kurang	ROO.26.03.15.27	Bidang Lalu Lintas dan	2	3	6	Memberikan pemahaman kepada staf mitra bidang terkait

No	Kegiatan	Tahap Pelaksanaa n Kegiatan	Risiko			Analisis Risiko			Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)
			Uraian	Kode	Pemilik	Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko	
				Risiko					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
			memahami data yang akan dikaji		Keselamatan				
		Tahap kegiatan lapangan / PAM	Risiko Fraud : Terjadinya manipulasi data yang tidak sesuai dengan yang ada	ROO.26 .03.15.2 7	Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan	3	3	9	Memberikan pemahaman kepada staf mitra bidang terkait pemahaman data
		Tahap Identifikasi Masalah Keselamatan	Risiko Operasional :Petugas kurang memahami tentang masalah yang di identifikasi	ROO.26 .03.15.2 7	Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan	2	3	6	Memberikan pemahaman kepada staf mitra bidang terkait pemahaman data
		Tahap Analisis	Risiko Operasional	ROO.26 .03.15.2	Bidang Lalu	2	2	4	Memberikan pemahaman kepada

No	Kegiatan	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	Risiko			Analisis Risiko			Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)
			Uraian	Kode	Pemilik	Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko	
				Risiko					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
		Risiko Keselamatan	:Petugas kurang memahami tentang masalah yang diidentifikasi	7	Lintas dan Keselamatan				staf mitra bidang terkait pemahaman data
		Tahap Penyusunan Rekomendasi	Risiko Operasional : Petugas kurang memahami dokumen rekomendasi yang akan disusun	ROO.26 .03.15.2 7	Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan	2	3	6	Melakukan koordinasi secara intens kepada mitra bidang terkait
14	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai	Penyusunan dan perencanaan	Risiko Operasional: Perencanaan tidak sesuai	ROO.26 .03.15.2 7	Kepala Bidang Angkutan	2	2	4	Dilakukan optimalisasi peran SDM yang ada melalui pembagian tugas dan

No	Kegiatan	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	Risiko			Analisis Risiko			Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)
			Uraian	Kode	Pemilik	Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko	
				Risiko					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
	dan Danau		dengan kebutuhan riil						pendampingan teknis
		Pengumpulan data	Risiko Operasional: Ketidakakuratan data yang dikumpulkan	ROO.26.03.15.27	Kepala Bidang Angkutan	2	2	4	Dilakukan penerapan standar operasional prosedur (SOP) pengumpulan dan pencatatan data
		Monitoring secara berkala sarana dan prasana keselamatan pada pelayanan ASDP	Risiko Operasional: Tidak optimal dalam pelaksanaan monitoring	ROO.26.03.15.27	Kepala Bidang Angkutan	2	1	2	Dilakukan pengaturan jadwal dan pembagian tugas personel secara efektif
		Evaluasi hasil monitoring	Risiko Operasional: Terhambatn	ROO.26.03.15.27	Kepala Bidang Angkutan	2	1	2	Dilakukan optimalisasi peran SDM yang ada

No	Kegiatan	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	Risiko			Analisis Risiko			Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)
			Uraian	Kode	Pemilik	Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko	
				Risiko					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
			ya hasil evaluasi		n				melalui pembagian tugas sesuai kompetensi
		Sosialisasi dan melakukan peningkatan fasilitas keselamatan pelayanan ASDP	Risiko Operasional: Kurang maksimalnya peningkatan fasilitas keselamatan pelayanan ASDP	ROO.26.03.15.27	Kepala Bidang Angkutan	2	2	4	Dilakukan penetapan prioritas pemenuhan fasilitas keselamatan berdasarkan tingkat risiko dan urgensi
15	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Penyusunan dan atau perencanaan kegiatan	Risiko Operasional : kurangnya SDM dalam pemahaman sistem perencanaan kegiatan	ROO.26.03.15.27	Kepala Bidang Angkutan	2	1	2	Memberikan pemahaman kepada petugas terkait penyusunan dan perencanaannya

No	Kegiatan	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	Risiko			Analisis Risiko			Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)
			Uraian	Kode	Pemilik	Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko	
				Risiko					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
		Monitoring secara berkala sarana dan prasana keselamatan pada perlintasan sebidang	Risiko Operasional : Kuantitas SDM yang ada di Bidang Angkutan tidak memadai dibandingkan jumlah obyek yang harus di monitoring	ROO.26 .03.15.2 7	Kepala Bidang Angkutan	3	2	6	Dilakukan pengaturan prioritas pengawasan berdasarkan tingkat risiko dan urgensi, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan monitoring dan pelaporan
		Dari hasil monitoring kemudian dilaksanakan perbaikan terhadap kerusakan	Risiko Operasional : Banyaknya laporan kerusakan tidak sebanding	ROO.26 .03.15.2 7	Kepala Bidang Angkutan	3	2	6	Dilakukan penetapan skala prioritas penanganan perbaikan palang pintu berdasarkan tingkat urgensi dan dampak keselamatan

No	Kegiatan	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	Risiko			Analisis Risiko			Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)
			Uraian	Kode	Pemilik	Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko	
				Risiko					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
		palang pintu maupun peralatan yang lainnya	dengan tenaga teknisi yang ada sehingga sering terjadi keterlambatan dalam penyelesaian perbaikan palang pintu						
		Melaksanakan pembinaan petugas dan sekaligus melaksanakan pengecekan dari hasil perbaikan	Risiko Operasional : perlunya penambahan SDM yang Khusus menangani perbaikan, monitoring dan bagian	ROO.26 .03.15.2 7	Kepala Bidang Angkutan	2	2	4	Dilakukan penataan ulang beban kerja SDM yang ada, serta mengusulkan penambahan SDM yang memadai

No	Kegiatan	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	Risiko			Analisis Risiko			Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)
			Uraian	Kode	Pemilik	Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko	
				Risiko					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
		yang telah dilakukan	administrasi khusus pencatatan absensi dan kegiatan perbaikan serta update data						
		Melaksanakan evaluasi secara berkala terhadap apa yang sudah dilaksanakan	Risiko Operasional : Banyaknya laporan kerusakan tidak sebanding dengan tenaga teknisi yang ada	ROO.26.03.15.27	Kepala Bidang Angkutan	3	2	6	Dilakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi pelaporan kerusakan, serta pengusulan penambahan tenaga teknisi sesuai kebutuhan

BAB III

HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Berdasarkan rencana dan realisasi pengelolaan risiko pelaksanaan kegiatan terdapat beberapa risiko yang terjadi. Namun, jika melihat hasil pembobotan analisis risiko yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan mayoritas risiko yang terjadi tidak memerlukan tindakan yang berdasar pada Peraturan Bupati Lamongan No. 17 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan. Dalam implementasinya hambatan yang terjadi bersifat minor sehingga tidak terlalu mengganggu kegiatan untuk mencapai tujuan Perangkat Daerah pada Triwulan I Tahun 2026.

BAB IV MONITORING RISIKO DAN RTP

Monitoring Risiko dan RTP

Berdasarkan hasil monitoring risiko dan Rencana Tindak Pengendalian manajemen risiko yang telah disusun, hasilnya Dinas Perhubungan mampu untuk mengendalikan risiko yang telah dipetakan. Upaya Pengendalian yang saat ini yang telah dilakukan tentu berjalan dengan baik, sehingga risiko yang telah dipetakan bisa di minimalisir melalui tindak pengendalian yang sudah ada saat ini selama tribulan I Tahun 2026.

BAB V PENUTUP

Penutup

Berdasarkan hasil Manajemen Risiko yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kab. Lamongan tentu sudah di petakkan berdasarkan setiap tahapan kegiatan yang telah dilakukan. Penilaian skala juga sudah dilakukan sebagai langkah untuk menentukan tindak pengendalian selanjutnya berdasarkan skala kemungkinan dan skala dampak yang disesuaikan dengan Peraturan Bupati Lamongan No. 17 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan. Hasilnya adalah Dinas Perhubungan mampu untuk meminimalisir terjadinya risiko operasional yang berpotensi menghambat tujuan organisasi pada Triwulan I I Tahun 2026. Hal ini tercermin dengan pengendalian risiko yang sudah ada saat ini telah dilaksanakan dengan baik sehingga risiko yang telah dipetakan dapat diminimalisir terjadinya risiko tersebut.

Dinas Perhubungan terus berkomitmen untuk senantiasa melakukan tindak mitigasi atau pengendalian terhadap risiko yang berpotensi terjadi di setiap tahapan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan demi mencapai tujuan strategis Organisasi Perangkat Daerah.